

# Analisis Kesesuaian Praktik Etika Profesi Guru BK dengan Standar ABKIN di Sekolah SMP, SMA, dan SMK

Naelul Muna<sup>1</sup> | Bayu Aji Laksono<sup>2</sup> | Natasya Shelamitha<sup>3</sup> | Mawaddah<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Dosen Prodi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Wiralodra Indramayu

<sup>2</sup> Mahasiswa Prodi BKPI, Fakultas FAI, Universitas Wiralodra Indramayu

<sup>3</sup> Mahasiswa Prodi BKPI, Fakultas FAI, Universitas Wiralodra Indramayu

<sup>4</sup> Mahasiswa Prodi BKPI, Fakultas FAI, Universitas Wiralodra Indramayu

## Korespondensi

Jl. Ir. H Juanda KM. 03,  
Karanganyar, Indramayu,  
Karanganyar, Kec. Indramayu,  
Kabupaten Indramayu, Jawa  
Barat 45213, e-mail:

[naelulmuna96@gmail.com](mailto:naelulmuna96@gmail.com)

## Abstract

*The implementation of professional ethics by school guidance and counseling (BK) teachers still faces challenges in consistently applying the principles of the professional code of ethics. This study aims to analyze the conformity of BK teachers' ethical practices with the ABKIN Code of Ethics standards at the junior high school (SMP), senior high school (SMA), and vocational high school (SMK) levels. A descriptive qualitative approach was used with a collective case study method at three public schools in Indramayu Regency. The results show that the implementation of professional ethics by BK teachers is generally in accordance with the standards, particularly in maintaining confidentiality, fostering supportive counselor-student relationships, and showing respect for students. However, differences in implementation were found across school levels, influenced by teachers' educational backgrounds, school culture, and access to resources. BK teachers demonstrated high ethical awareness, although not all fully understood the systematic forms of violations and sanctions. In conclusion, the ethical practices of BK teachers are generally good but should be strengthened through ethical training and enhanced professional collaboration to improve the quality of school counseling services.*

## KEYWORDS:

*Professional Ethics, Guidance and Counseling Teachers, ABKIN Code of Ethics*

**Abstrak**

Implementasi etika profesi guru bimbingan dan konseling (BK) di sekolah masih menghadapi tantangan dalam penerapan prinsip-prinsip kode etik secara konsisten. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian praktik etika profesi guru BK dengan standar Kode Etik ABKIN di jenjang SMP, SMA, dan SMK. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus kolektif pada tiga sekolah negeri di Kabupaten Indramayu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan etika profesi guru BK secara umum sudah sesuai standar, terutama dalam hal asas kerahasiaan, hubungan konselor-konseli, dan penghargaan terhadap siswa. Namun, terdapat perbedaan implementasi antarjenjang yang dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan guru, budaya sekolah, dan akses terhadap sumber daya. Guru BK juga menunjukkan kesadaran etik yang tinggi, meskipun belum semua memahami secara sistematis bentuk pelanggaran dan sanksinya. Kesimpulannya, praktik etika guru BK sudah cukup baik, namun perlu ditingkatkan melalui pelatihan etik dan penguatan kolaborasi lintas profesional sebagai upaya peningkatan kualitas layanan konseling sekolah.

**KATA KUNCI:**

Etika Profesi, Guru Bimbingan dan Konseling, Kode Etik ABKIN.

## 1 | Pendahuluan

### A. Latar Belakang

Etika profesi merupakan fondasi fundamental dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Dalam konteks pendidikan, guru bimbingan dan konseling (BK) tidak hanya bertugas memberikan bantuan

terhadap permasalahan akademik, pribadi, sosial, maupun karier siswa, tetapi juga dituntut untuk melaksanakan tugas tersebut secara etis, profesional, dan bertanggung jawab. Kode Etik Bimbingan dan Konseling yang dikeluarkan oleh Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN) menjadi acuan normatif sekaligus pedoman etik

bagi para guru BK dalam memberikan layanan yang bermartabat dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi peserta didik(1).

Profesionalisme guru BK tidak hanya diukur dari kompetensi teknis dalam memberikan layanan, tetapi juga dari kemampuan menerapkan nilai-nilai etika profesi dalam setiap interaksi dengan konseli. Dalam konteks Indonesia, kode etik ABKIN menjadi rujukan utama yang mengatur hubungan konselor dengan konseli, sesama profesional, dan masyarakat luas(2).

Namun, realitas di lapangan sering kali menunjukkan bahwa implementasi etika profesi oleh guru BK belum sepenuhnya ideal. Beberapa studi sebelumnya menemukan bahwa masih terdapat praktik yang menyimpang dari prinsip-prinsip etik, seperti kurangnya jaminan kerahasiaan, relasi kuasa yang tidak seimbang, hingga intervensi yang bias nilai pribadi guru. Hal ini menunjukkan perlunya pelatihan etika yang lebih intensif bagi guru untuk memastikan penerapan prinsip-prinsip etik dalam praktik bimbingan dan konseling di sekolah(3).

Selain itu, masih ada guru BK yang belum memahami secara komprehensif substansi kode etik ABKIN, sehingga menimbulkan inkonsistensi antara teori dan praktik di lapangan. Hal ini menunjukkan adanya urgensi untuk memperkuat pemahaman dan implementasi etika profesi melalui program pengembangan profesional berkelanjutan(4).

Lebih lanjut, dilema etis sering muncul dalam praktik konseling sekolah, terutama terkait dengan batas kerahasiaan ketika melibatkan orang tua, guru, atau pihak lain. Konselor sekolah sering menghadapi situasi di mana mereka harus menyeimbangkan antara kepentingan konseli dengan tuntutan sistem sekolah atau ekspektasi orang tua. Dalam kondisi seperti ini, pemahaman mendalam terhadap kode etik menjadi sangat penting untuk mengambil keputusan yang tepat dan bertanggung jawab(5).

Di sisi lain, belum banyak penelitian yang secara eksplisit membandingkan implementasi etika profesi guru BK di berbagai jenjang pendidikan, seperti Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas

(SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Padahal, perbedaan karakteristik psikososial siswa, kurikulum, dan budaya sekolah di ketiga jenjang tersebut sangat mungkin mempengaruhi cara guru BK mengimplementasikan etika profesinya. Siswa SMP yang berada dalam masa transisi dari anak-anak ke remaja memiliki kebutuhan konseling yang berbeda dengan siswa SMA yang sudah memasuki fase remaja akhir, atau siswa SMK yang lebih berorientasi pada kesiapan kerja(4,6).

Observasi awal yang dilakukan di tiga sekolah negeri di Kabupaten Indramayu menunjukkan gambaran yang menarik. Di SMP Negeri 1 Indramayu, guru BK cenderung menghadapi kasus-kasus terkait adaptasi sosial dan perilaku, dengan pendekatan yang lebih protektif. Sementara itu, di SMA Negeri 1 Indramayu, guru BK lebih banyak menangani isu-isu akademik dan perencanaan karier, dengan gaya komunikasi yang lebih setara. Adapun di SMK Negeri 1 Indramayu, fokus layanan BK lebih kepada kesiapan kerja, manajemen stres, dan bimbingan praktik industri, dengan pendekatan yang lebih pragmatis dan informal.

Kekosongan literatur komparatif lintas jenjang ini menunjukkan adanya gap penelitian yang perlu dijawab melalui studi yang mendalam dan lintas jenjang. Penelitian ini diharapkan dapat mengisi celah tersebut dengan memberikan gambaran komprehensif tentang bagaimana konteks jenjang pendidikan memengaruhi implementasi etika profesi guru BK.

Penelitian ini dilakukan di tiga sekolah negeri yang representatif di Kabupaten Indramayu: SMP Negeri 1 Indramayu, SMA Negeri 1 Indramayu, dan SMK Negeri 1 Indramayu. Ketiga sekolah tersebut dipilih karena merupakan sekolah unggulan dengan jumlah siswa yang besar serta memiliki guru BK yang telah berpengalaman dan terlatih. Selain itu, sekolah-sekolah ini juga sering dijadikan rujukan praktik pendidikan inklusif dan layanan konseling di wilayahnya. Dengan memilih sekolah dari tiga jenjang berbeda di lokasi yang relatif beragam secara geografis dan administratif, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang holistik dan komparatif mengenai implementasi etika profesi guru BK.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian praktik etika profesi guru BK di ketiga sekolah tersebut dengan standar kode etik yang ditetapkan oleh ABKIN. Secara khusus, penelitian ini akan: (1) mendeskripsikan praktik etika profesi guru BK di SMP, SMA, dan SMK; (2) mengidentifikasi perbedaan implementasi etika profesi antarjenjang pendidikan; dan (3) menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi implementasi etika profesi guru BK.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual terhadap pengembangan praktik etis dalam layanan bimbingan dan konseling sekolah, serta menjadi referensi kebijakan untuk peningkatan kompetensi etik guru BK melalui pelatihan atau supervisi etis yang lebih terarah.

## **B. Kerangka Teori**

### **a. Konsep etika profesi dalam bimbingan dan konseling**

Etika profesi merupakan seperangkat prinsip moral yang mengatur perilaku profesional dalam suatu bidang pekerjaan tertentu. Dalam konteks bimbingan dan konseling, etika

profesi berfungsi sebagai pedoman bagi konselor dalam menjalankan tugasnya secara bertanggung jawab, kompeten, dan berorientasi pada kesejahteraan konseli(7). Etika konseling sebagai standar perilaku yang mengatur hubungan profesional antara konselor dengan konseli, yang mencakup aspek-aspek seperti kompetensi, integritas, kerahasiaan, dan penghormatan terhadap hak-hak konseli(8).

Etika profesi konseling dibangun atas beberapa prinsip filosofis utama, yaitu: (1) otonomi, yang menghormati hak konseli untuk membuat keputusan sendiri; (2) beneficence, yaitu berbuat baik untuk kepentingan konseli; (3) non-maleficence, yaitu tidak merugikan konseli; (4) keadilan, yang memperlakukan semua konseli secara adil; dan (5) fidelitas, yaitu menjaga kepercayaan dan komitmen profesional. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan dalam pengambilan keputusan etis ketika konselor menghadapi dilema dalam praktik konseling(9).

### **b. Kode etik ABKIN sebagai standar profesional**

Di Indonesia, Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN) telah menetapkan Kode Etik Bimbingan dan Konseling sebagai acuan utama bagi praktisi konseling, termasuk guru BK di sekolah. Kode etik ini pertama kali dirumuskan pada tahun 2005 dan telah mengalami beberapa kali revisi untuk menyesuaikan dengan perkembangan profesi dan kebutuhan lapangan(10,11).

Kode Etik ABKIN mencakup beberapa aspek utama, antara lain: (1) kualifikasi dan kompetensi profesional, yang mengharuskan konselor memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dan terus mengembangkan kompetensinya; (2) hubungan konselor dengan konseli, yang menekankan pada penghormatan, kehangatan, dan pembatasan hubungan ganda; (3) asas kerahasiaan, yang menjadi pilar utama kepercayaan dalam hubungan konseling; (4) tanggung jawab profesional, termasuk perencanaan dan evaluasi layanan; (5) penghargaan terhadap konseli, yang menempatkan konseli sebagai subjek dan menghormati keberagaman; (6) kolaborasi profesional dengan berbagai pihak; dan (7) sanksi atas pelanggaran etika(4,10,12).

Prayitno dan Amti menegaskan bahwa kode etik bukan sekadar aturan formal, tetapi merupakan internalisasi nilai profesional yang harus dihayati oleh setiap konselor. Pemahaman mendalam terhadap kode etik akan membantu konselor dalam menghadapi dilema etis yang kompleks dalam praktik sehari-hari(13).

### **c. Praktik etika profesi guru BK di sekolah**

Guru BK di sekolah memiliki peran yang unik karena bekerja dalam setting pendidikan yang melibatkan berbagai pihak, seperti siswa, orang tua, guru mata pelajaran, dan manajemen sekolah. Kompleksitas peran ini menuntut guru BK untuk memiliki sensitivitas etis yang tinggi(14). Gysbers dan Henderson menjelaskan bahwa konselor sekolah harus mampu menyeimbangkan antara kepentingan individual konseli dengan tuntutan sistem sekolah, yang seringkali tidak mudah(15).

Beberapa isu etis yang sering muncul dalam praktik konseling sekolah antara lain: (1) batasan kerahasiaan, terutama ketika menyangkut keselamatan konseli atau pihak lain; (2)

informed consent, terutama untuk konseli di bawah umur; (3) dual relationship, seperti ketika konselor juga merupakan guru mata pelajaran; (4) kompetensi budaya dalam menghadapi keberagaman siswa; dan (5) dokumentasi dan penyimpanan data konseling(16).

Guru BK sering menghadapi dilema etis terkait dengan peran gandanya sebagai educator dan counselor. Misalnya, ketika harus melaporkan perilaku siswa yang melanggar aturan sekolah namun disampaikan dalam sesi konseling yang seharusnya konfidensial. Dalam situasi seperti ini, guru BK perlu memiliki kerangka pengambilan keputusan etis yang jelas berdasarkan kode etik profesi(17).

#### **d. Faktor-faktor yang memengaruhi implementasi etika profesi**

Implementasi etika profesi guru BK dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Beberapa faktor kunci, antara lain: (1) pengetahuan dan pemahaman konselor tentang kode etik; (2) pengalaman dan kematangan profesional; (3) budaya organisasi dan dukungan institusi; (4) akses terhadap

supervisi dan konsultasi profesional; dan (5) karakteristik konseli dan konteks masalah yang dihadapi(18).

Dalam konteks Indonesia, faktor budaya lokal dan nilai-nilai kearifan lokal juga memengaruhi cara guru BK menerapkan prinsip-prinsip etika profesi. Misalnya, konsep kerahasiaan dalam budaya kolektifis Indonesia dapat berbeda interpretasinya dengan konsep dalam budaya individualis Barat(19).

Selain itu, perbedaan jenjang pendidikan juga dapat memengaruhi implementasi etika profesi. Siswa SMP, SMA, dan SMK memiliki karakteristik perkembangan yang berbeda, sehingga pendekatan dan pertimbangan etis guru BK juga perlu disesuaikan(4,20).

Berdasarkan kerangka teori di atas, penelitian ini akan menganalisis bagaimana guru BK di SMP, SMA, dan SMK mengimplementasikan prinsip-prinsip etika profesi berdasarkan standar ABKIN, serta faktor-faktor apa saja yang memengaruhi implementasi tersebut dalam konteks masing-masing jenjang pendidikan.

## **2 | Metode**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian studi kasus kolektif (*collective case study*). Pendekatan kualitatif dipilih untuk menggali secara mendalam pemaknaan, pengalaman, dan pandangan guru bimbingan dan konseling (BK) terhadap implementasi etika profesi di sekolah masing-masing. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami praktik etika profesi dalam konteks nyata dan dinamis, sesuai dengan karakteristik lingkungan sekolah(21).

Studi kasus kolektif digunakan karena penelitian ini melibatkan tiga lokasi berbeda, yaitu SMP Negeri 1 Indramayu, SMA Negeri 1 Indramayu, dan SMK Negeri 1 Indramayu, dengan tujuan membandingkan implementasi etika profesi guru BK lintas jenjang pendidikan. Studi kasus kolektif sangat tepat digunakan untuk mengkaji fenomena yang kompleks dan kontekstual melalui eksplorasi mendalam terhadap beberapa unit kasus(22).

Ketiga sekolah ini dipilih secara purposive karena memiliki jumlah siswa yang besar, layanan BK yang aktif, serta

guru BK yang telah memiliki sertifikasi atau pengalaman kerja minimal lima tahun. Pemilihan lokasi ini bertujuan untuk memastikan validitas data dan representasi praktik etika profesi guru BK di jenjang pendidikan menengah pertama dan atas.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama:

1. Wawancara mendalam (*in-depth interview*): Digunakan untuk menggali pandangan dan pengalaman guru BK terkait implementasi kode etik ABKIN. Wawancara dilakukan dengan 9 orang guru BK (3 orang dari masing-masing sekolah) menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur yang telah divalidasi.
2. Observasi non-partisipatif: Dilakukan untuk melihat praktik layanan BK yang dilakukan guru dalam konteks sekolah, termasuk sesi konseling individual, konseling kelompok, dan interaksi guru BK dengan siswa di luar sesi konseling formal.
3. Studi dokumentasi: Menganalisis dokumen seperti program layanan BK, log konseling, catatan kasus, dan panduan operasional prosedur

layanan BK untuk mengonfirmasi penerapan prinsip-prinsip etika.

Data dianalisis menggunakan analisis tematik (*thematic analysis*) sebagaimana dikembangkan oleh Braun dan Clarke(23). Analisis ini melalui enam tahap: (1) transkripsi data wawancara dan observasi; (2) pembacaan dan pemahaman awal; (3) pembuatan kode awal (initial coding); (4) pencarian tema-tema utama; (5) peninjauan dan perumusan tema; dan (6) penyusunan laporan temuan yang berfokus pada makna dan interpretasi tema. Analisis tematik dipilih karena mampu menangkap kompleksitas data kualitatif dan memberikan ruang interpretasi yang luas terhadap makna yang terkandung dalam praktik etis guru BK di sekolah.

### 3 | Hasil dan Pembahasan

#### A. Hasil Penelitian

Penelitian ini bertujuan menganalisis kesesuaian praktik etika profesi guru BK dengan standar Kode Etik ABKIN di tiga jenjang pendidikan. Temuan diklasifikasikan ke dalam 7 aspek etika profesi BK berdasarkan pedoman ABKIN: (1) kualifikasi dan kompetensi, (2) hubungan konselor-konseli, (3) asas

kerahasiaan, (4) tanggung jawab profesional, (5) penghargaan terhadap konseli, (6) kolaborasi profesional, dan (7) pelanggaran serta sanksi etis.

**TABEL 1** Ringkasan Implementasi Etika Profesi Guru BK di Sekolah

No	Aspek Etika	SMPN 1	SMAN 1	SMKN 1
1	Kualifikasi Guru BK	2 Sarjana BK 1 Sarjana Psikologi	4 sarjana BK	6 Sarjana BK
2	Hubungan dengan Konseli	Menjaga kedekatan tanpa melanggar batas; pendekatan ramah	Menjaga kedekatan tanpa melanggar batas; pendekatan ramah	Suasa informal dan nyaman, berbasis kepercayaan
3	Asas Kerahasiaan	Ketat, hanya untuk pihak terkait	Ketat, hanya untuk pihak terkait	Ketat, hanya untuk pihak terkait
4	Perencanaan & Evaluasi Layanan	Survei awal, evaluasi rutin, klasikal & individual	Survei awal, evaluasi rutin, klasikal & individual	Survei awal, evaluasi rutin, klasikal & individual
5	Kolaborasi	Terbatas internal	Terbatas internal,	Terbatas internal

	Profesional	I, belum melibatkan eksternal	belum melibatkan eksternal	I, belum melibatkan eksternal
6	Penghargaan pada Konseling	Tidak membedakan, penerimaan tinggi	Tidak membedakan, penerimaan tinggi	Tidak membedakan, penerimaan tinggi
7	Pelanggaran Etika & Sanksi	Tindak lanjut internal dari KS dan Waka	Tindak lanjut internal dari KS dan Waka	Tindak lanjut internal dari KS dan Waka

Kualifikasi guru BK di ketiga sekolah cukup memadai dan sesuai standar minimal ABKIN, meskipun di SMP masih terdapat guru berlatar psikologi. Hal ini menunjukkan adanya disparitas latar belakang akademik, yang dapat memengaruhi pendekatan layanan BK. Temuan ini sejalan dengan pendapat Prayitno bahwa latar belakang pendidikan yang relevan sangat memengaruhi kualitas diagnosis dan intervensi layanan BK(13).

Di semua jenjang, guru BK berupaya membangun relasi yang suportif dan tidak mengintimidasi. Di SMK, pendekatan lebih informal melalui ruang terbuka dan dialog ringan. Di SMP

dan SMA, relasi dibangun melalui kunjungan kelas, pendekatan personal, dan kontrol etika fisik yang ketat. Ini selaras dengan teori konseling humanistik Rogers (1957) bahwa kedekatan emosional dan empati adalah fondasi relasi konselor-konseli(24).

Semua guru BK konsisten menjaga asas kerahasiaan sebagai pilar etik. Misalnya, di SMP dan SMK, catatan siswa disimpan di ruang khusus dan tidak dibagikan kecuali atas dasar kebutuhan. Penegakan prinsip ini menunjukkan kesesuaian dengan Kode Etik ABKIN (2018) yang menegaskan pentingnya menjaga kerahasiaan demi keamanan psikologis siswa(10).

Ketiganya menerapkan asesmen awal berupa angket dan observasi. SMA unggul dalam digitalisasi asesmen menggunakan Google Form, sementara SMK menggunakan kartu konseling sebagai dokumentasi manual. SMP masih terbatas pada angket sederhana dan pencatatan manual. Praktik ini menunjukkan adanya dinamika sesuai konteks dan kapasitas masing-masing sekolah, sebagaimana diungkapkan dalam studi oleh Stamnes (1991) bahwa

konteks lokal memengaruhi implementasi program konseling(25).

SMK dan SMA menunjukkan kolaborasi internal yang lebih kuat dengan wali kelas, guru mapel, dan sesekali pihak luar seperti polisi atau psikolog. SMP belum secara aktif menjalin kolaborasi eksternal, yang menjadi catatan untuk pengembangan ke depan. Ini sejalan dengan temuan Milaturokhah & Nugraha (2023) bahwa kolaborasi profesional meningkatkan efektivitas layanan BK lintas masalah(26).

Ketiganya memperlihatkan penerimaan terhadap keberagaman siswa. Guru BK tidak membedakan siswa bermasalah dan siswa berprestasi. Bahkan di SMK, pendekatan disertai reward kecil seperti makanan ringan. Pendekatan ini mencerminkan nilai etik dasar konseling yang menempatkan siswa sebagai subjek, bukan objek intervensi(27).

Semua guru BK menyadari adanya konsekuensi pelanggaran etika, meski belum pernah menghadapi sanksi berat. Sanksi internal oleh kepala sekolah, teguran dari rekan sejawat, dan pelaporan ke pihak luar menjadi mekanisme pengawasan. Kesadaran etis

ini merupakan refleksi dari pemahaman profesional terhadap tanggung jawab moral dan hukum.

## B. Pembahasan

### a. Perbedaan Latar Belakang Guru BK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian praktik etika profesi guru bimbingan dan konseling (BK) dengan standar Kode Etik ABKIN di tiga jenjang pendidikan, yaitu SMP, SMA, dan SMK. Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi di tiga sekolah negeri unggulan di Kabupaten Indramayu, ditemukan bahwa implementasi etika profesi telah berjalan relatif baik namun terdapat perbedaan karakteristik antarjenjang.

Salah satu faktor yang menjelaskan variasi implementasi etika profesi adalah perbedaan latar belakang akademik dan pengalaman profesional guru BK. Di SMP, terdapat guru BK dengan latar belakang psikologi, sedangkan di SMA dan SMK seluruh guru merupakan lulusan program studi BK, bahkan sebagian telah menempuh pendidikan S2. Hal ini berpengaruh terhadap pemahaman dan penerapan kode etik secara konseptual dan praktis.

Menurut Corey (2013), profesionalisme konselor sangat ditentukan oleh latar belakang pendidikan dan pelatihan yang sesuai, karena aspek etis tidak hanya dipahami sebagai aturan formal, tetapi sebagai internalisasi nilai dalam praktik(27). Temuan ini sejalan dengan studi Valica & Rohn (2013) yang menunjukkan bahwa guru BK berlatar pendidikan non-BK cenderung lebih lemah dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip etik secara utuh(28).

Perbedaan jenjang pendidikan juga menciptakan kondisi lingkungan dan budaya sekolah yang berbeda. Misalnya, di SMK, pendekatan konseling lebih bersifat informal, dan guru BK menggunakan strategi seperti “membangun kenyamanan dengan reward kecil” untuk meningkatkan keterbukaan siswa. Hal ini menunjukkan bahwa konteks sekolah dan karakteristik peserta didik turut menentukan gaya interaksi konselor dan efektivitas penerapan asas-asas etika, seperti penghargaan terhadap konseli dan asas kerahasiaan.

Studi oleh Nofianti, dkk (2020) mengungkap bahwa konselor sekolah

yang mampu menyesuaikan pendekatan dengan karakter siswa akan lebih efektif dalam menerapkan etika profesi, termasuk membangun hubungan yang tidak mengintimidasi(29). Hal ini mendukung penggunaan pendekatan humanistik seperti yang dijelaskan oleh Rogers (1957), yang menekankan empati, penghargaan positif tanpa syarat, dan keaslian konselor dalam relasi konseling(24).

#### **b. Keterbatasan Sarana dan Kolaborasi**

Perbedaan lain yang muncul adalah keterbatasan sarana dan kerjasama profesional dengan pihak luar. Guru BK di SMP dan SMK menyampaikan bahwa asesmen dan alat bantu dilakukan secara manual dan mandiri, tanpa dukungan dari psikolog atau lembaga eksternal. Di sisi lain, SMA mulai memanfaatkan platform digital seperti Google Form untuk asesmen dan memiliki akses yang lebih baik terhadap pelatihan luar.

Kondisi ini mengindikasikan adanya tantangan dalam menerapkan prinsip etik tentang tanggung jawab profesional dan pengembangan layanan berbasis riset. Giovanni, dkk (2022) menyatakan bahwa validitas praktik

profesional sangat ditentukan oleh keberdayaan sistem pendukung, termasuk supervisi dan akses terhadap sumber daya eksternal. Dalam konteks ini, keterbatasan tersebut tidak berarti pelanggaran etika, tetapi bisa menjadi indikator lemahnya sistem penjaminan mutu layanan BK(30).

### c. Kesadaran dan Pemaknaan terhadap Kode Etik

Temuan menarik lainnya adalah adanya **persepsi dan pemaknaan berbeda terhadap kode etik antar guru BK**. Di ketiga jenjang, semua guru menyatakan telah melaksanakan kode etik, namun pada praktiknya, sebagian masih belum memahami batasan teknis secara konseptual. Sebagai contoh, sebagian besar guru tidak dapat menyebutkan secara sistematis bentuk-bentuk pelanggaran dan sanksinya, meskipun mengaku telah menerapkannya secara “naluriyah”.

Pemahaman yang dangkal terhadap kode etik ABKIN dapat menyebabkan terjadinya kesalahan etis secara tidak sadar (unintentional ethical violations), yang berisiko mencederai profesionalisme. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan etik yang tidak

hanya menekankan pada hafalan kode etik, tetapi juga studi kasus dan refleksi etis yang kontekstual.

## 5 | Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

*Pertama*, implementasi etika profesi guru BK di SMP, SMA, dan SMK Negeri 1 Indramayu secara umum telah sesuai dengan standar Kode Etik ABKIN, khususnya dalam aspek kerahasiaan, hubungan konselor-konseli, dan penghargaan terhadap konseli. Guru BK di ketiga jenjang menunjukkan komitmen yang kuat dalam menjaga asas kerahasiaan, membangun relasi yang suportif dengan siswa, dan menghormati keberagaman serta hak-hak konseli.

*Kedua*, terdapat perbedaan karakteristik implementasi etika profesi antarjenjang pendidikan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: latar belakang pendidikan dan pengalaman profesional guru BK, karakteristik perkembangan siswa, budaya dan konteks sekolah, serta ketersediaan sarana dan akses terhadap sumber daya eksternal. Di SMP,

pendekatan cenderung lebih protektif dengan keterlibatan orang tua yang lebih intensif. Di SMA, terdapat keseimbangan antara dukungan dan pemberian otonomi kepada siswa. Sementara di SMK, pendekatan lebih informal dan pragmatis sesuai dengan orientasi vokasional siswa.

*Ketiga*, meskipun guru BK menunjukkan kesadaran etis yang tinggi dan berupaya menerapkan prinsip-prinsip etika dalam praktik sehari-hari, pemahaman teknis dan konseptual terhadap kode etik masih perlu diperkuat. Sebagian guru belum memahami secara sistematis bentuk-bentuk pelanggaran etika dan sanksinya, serta belum menggunakan model pengambilan keputusan etis yang terstruktur dalam menghadapi dilema etis.

*Keempat*, terdapat beberapa tantangan dalam implementasi etika profesi guru BK, antara lain: keterbatasan akses terhadap supervisi profesional eksternal, minimnya kolaborasi dengan profesional lain di luar sekolah, keterbatasan sarana dan instrumen asesmen yang terstandar, serta adanya

dilema etis yang kompleks dalam menyeimbangkan kepentingan individual siswa dengan tuntutan institusional.

## Daftar Pustaka

- [1] Suryani R, Tarigan EA, Pangesty HA, Putri KA, Tarigan WA. Kompetensi Guru BK SMA Negeri 10 Medan dalam Memahami Kode Etik Profesionalisme Seorang Guru Bimbingan dan Konseling. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*. 2023 Jan 6;5(1):286-92.
- [2] Purnamasari Y, Budiman N, Nadhiroh NA. Etika Dalam Pelaksanaan Konseling Online Ditinjau Dari Kode Etik Abkin. *Empati: Jurnal Bimbingan dan Konseling*. 2024 May 4;11(1):30-43.
- [3] Ramadhani TR, Pakpahan RO, Sitio DA, Pratiwi SA, Syafitri RA. Perbedaan Prinsip Profesi Guru BK dan Rekan Sejawat di SMP Negeri 1 Tanjung Balai. *Harmoni Pendidikan: Jurnal Ilmu Pendidikan*. 2024 Oct 9;1(4):353-65.
- [4] Harahap AP, Darus AR, Siregar MA, Rahmadana W. Analisis Pemahaman Kode Etik Profesi Konseling Pada Guru Bimbingan dan Konseling di MAN. *Jurnal Bikotetik (Bimbingan dan Konseling: Teori dan Praktik)*. 2022 Nov 18;6(2):101-10.
- [5] Froeschle JG, Crews C. An Ethics Challenge for School Counselors. *Journal of School Counseling*. 2010;8(14):n14.
- [6] Putri CA, Tagela U, Windrawanto Y. Studi Tentang Tugas Perkembangan Siswa dalam Program Layanan Dasar Bimbingan dan Konseling di SMP Negeri 3 Bringin Kabupaten Semarang. *Jurnal*

- Wahana Konseling. 2022 Sep 28;5(2):115-24.
- [7] Stauffer MD, Ordway AM, Owen L. Ethical and legal considerations in counseling. In: Introduction to the Counseling Profession 2013 Jun 7 (pp. 117-142). Routledge.
- [8] Kusmiati M, Rohmatullah N. Pentingnya Sikap Profesional untuk Meningkatkan Kepercayaan Konseli terhadap Konselor. Mimbar Kampus: Jurnal Pendidikan dan Agama Islam. 2023;22(1):1-6.
- [9] Levitt DH, Farry TJ, Mazzarella JR. Counselor ethical reasoning: Decision-making practice versus theory. Counseling and Values. 2015 Apr;60(1):84-99.
- [10] Asosiasi Bimbingan dan Konselin Indonesia, Kode Etik Bimbingan dan Konseling Indonesia, 2018.
- [11] Sare YD, Hidayah N, Rahman DH. Historical guidance and counseling perspective in Indonesia. In: 6th International Conference on Education and Technology (ICET 2020) 2020 Dec 4 (pp. 389-392). Atlantis Press.
- [12] Khusnah AA, Qurrotussalwa F, Ningtyas NM. Standar Kompetensi Konselor Multibudaya: Sebuah Studi Pustaka. Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisiplin. 2025 Juni 6;9(6):1-13.
- [13] Prayitno, Amti E. Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling, 2013, Jakarta: Rineka Cipta.
- [14] Adison J, Suryadi S. The Role of BK Teachers in Shaping Students' Personality to Become Superior Persons for Class XI Science SMAN 1 Koto XI Tarusan. Holistic Science. 2022 May 26;2(2):76-81.
- [15] Gysbers N, Henderson P. Developing and Managing Your School Guidance Program. 1988:365.
- [16] Ledyard PA. Counseling minors: Ethical and legal issues. Counseling and Values. 1998 Apr;42(3):171-7.
- [17] Salsabilla FP. Literature Review: Confidentiality Issues Between Guidance and Counseling Teachers and Colleagues. Psikoeduko: Jurnal Psikologi Edukasi dan Konseling. 2023;3(2):1-6.
- [18] Sujadi E. Kode etik profesi konseling serta permasalahan dalam penerapannya. Tarbawi: Jurnal ilmu pendidikan. 2018 Dec 10;14(2):69-77.
- [19] Yurika RE, Nugroho AR. Implementasi Nilai-Nilai kebudayaan Dalam Praktik bimbingan Dan Konseling di Indonesia [implementation of cultural values in guidance and counseling practices in Indonesia]. Journal of Contemporary Islamic Counselling. 2022 Apr 30;2(1):23-40.
- [20] Maulida SN, Budiman N, Nadhirah NA. Student Views of BK Teacher Profiles in Terms of BK Professional Ethics. Journal of Education and Counseling (JECO). 2023 Aug 15:37-46.
- [21] Fiantika, FR, dkk. Metodologi Penelitian Kualitatif. 2022. Padang: PT Global Eksekutif Teknologi.
- [22] Neuman WL. Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. 2019. Jakarta: Permata Puri Media.
- [23] Braun V, Clarke V. Using thematic analysis in psychology. Qualitative

- research in psychology. 2006 Jan 1;3(2):77-101.
- [24] Rogers, C. R. (1957). The necessary and sufficient conditions of therapeutic personality change. *Journal of Consulting Psychology*, 21(2), 95–103.
- [25] Diver-Stamnes AC. Assessing the effectiveness of an inner-city high school peer counseling program. *Urban education*. 1991 Oct;26(3):269-84.
- [26] Milaturokhah N, Nugraha MY. Guidance And Counseling In Junior High School (SMP) And High School (SMA). Asesment: Journal Of Counseling Guidance. 2023 Jun 26;1(1):29-33.
- [27] Corey G. Theory and practice of counseling and psychotherapy. Brooks/Cole Cengage Learning; 2013.
- [28] Valica M, Rohn T. Development of the professional competence in the ethics teachers. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*. 2013 Dec;106(1):865-72.
- [29] Nofianti A, Hidayah N, Rahman DH. Problematic Implementation of Counseling in Schools Based on Counselors' Code of Ethics. In 6th International Conference on Education and Technology (ICET 2020) 2020 Dec 4 (pp. 104-106). Atlantis Press.
- [30] Tebala GD, Slack Z, Fantini V, Masato S, Parla M, Cirocchi R, Di Saverio S. Professional responsibility between guidelines and customary practice. A conflict of interest?. *Medical Hypotheses*. 2022 Jan 1;158:110737.